

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM  
ISLAM (Studi Komparatif)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MARWA R**

NIM: 10300113014

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwa R  
Nim : 10300113014  
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 7 Juni 1996  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Lr. 4 No. 4  
Judul : Kedudukan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Komparatif)

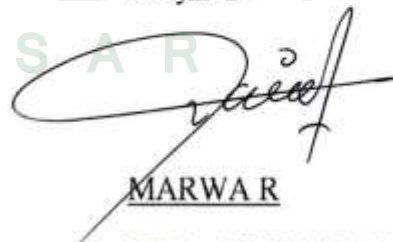
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Samata, 20 Agustus 2017

Penyusun



MARWA R

NIM : 10300113014

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Kedudukan Saksi Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*", yang disusun oleh Marwa R, NIM: 10300113014, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 2 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 25 Agustus 2017 M.

2 Dzulhijjah 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A	(.....)
Munaqisy II	: Hj. Rahmiati, S.Pd, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Kasjim, M.Th.I	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Kurniati, S.Ag, M.HI	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul, “Kedudukan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Komparatif)” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Makassar. Salam dan shalawat senantiasa dipanjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, sebagai Rahmatallilalamin. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung terutama keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan mendoakanku, Ayahanda H.Ruddin dan Ibunda (Alm) Hj. Hamsinah yang dengan penuh cinta dan kesabaran serta kasih sayang dalam membesarkan, mendidik, dan mendukung penulis yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Saudaraku tercinta mulai dari kakak pertama sampai ke 6 pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih untuk dukungan moral maupun sumbangsihnya selama berada dibangku perkuliahan dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Prof. Dr. H.Lomba Sultan, M.A. selaku Wakil Rektor II dan Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. selaku Pembantu Dekan I, Dr. Hamsir., S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan

II, Dr. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Pembantu Dekan III dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA. selaku penguji I dan Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd. selaku penguji II yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
4. Dr. H. Kasjim, SH., M. Th.I. dan Dr. Kurniati S. Ag., M.Hi. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan perhatiannya dengan penuh kesabaran serta ketulusan yang diberikan kepada penulis.
5. Sahabat SMP “Stf” Monic, Chece, Sari, Kiki, dan Indri yang telah menghibur dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat SMA “The Gengs Jokka” Fahry, Shaputri, Anto, Arya, Fatma, Mustakim dan Rasyid yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat Kampus Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, Nining Kameliah, Wahyuni Hamka, Nursari Fadillah, Ilhamsyah, Muhammad Risman, Muhammad Irham, Muh. Qardawi, M. Nursyam dan Muallim Bahar yang telah banyak mewarnai dalam hidup penulis baik suka maupun duka dan memotivasi dalam menyusun skripsi.

8. Teman-temanku khususnya Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Angkatan (A013) dan seluruh keluarga besar angkatan HPK yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu.
9. Keluarga KKN angkatan 55 Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Dusun Kampung Beru , Khususnya” in the gengs kakak-adik” Kasmawati, Nunung, Zahra, Ayu, Wahda dan Awal yang banyak memotivasi dan memberi semangat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik moral maupun material kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai.

Akhirnya hanya kepada Allah jugalah penulis serahkan segalanya, semoga semua pihak yang membantu mendapat pahala di sisi Allah swt., serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi penulis sendiri.

Samata, 20 Agustus 2017

Penyusun



MARWA R

NIM : 10300113014

## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1-13
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Pengertian Judul .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN .....	14-27
A. Pengertian Pembuktian.....	14
B. Dasar Hukum Pembuktian .....	18
C. Kewajiban Pembuktian .....	19
D. Teori Beban Pembuktian.....	25
BAB III    MACAM-MACAM ALAT BUKTI .....	28-48
A. Menurut Hukum Nasional .....	29
B. Menurut Hukum Islam.....	42
BAB IV    ANALISIS KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM .....	49-74
A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti	

dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam.....	51
B. Sisi Komparatif Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam.....	73
BAB V   PENUTUP.....	75-76
A. Kesimpulan .....	75
B. Implikasi Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77-79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	



## ABSTRAK

**NAMA : MARWA R**

**NIM : 10300113014**

**Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**

**Judul : Kedudukan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam  
(Studi Komparatif)**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum nasional dan hukum Islam dan untuk mengetahui komparatif keterangan saksi dalam hukum nasional dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan pendekatan syar'i. penelitian ini tergolong, sumber data diperoleh dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diolah dengan *identifikasi, reduksi dan editing* dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkap hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam hukum nasional telah dimuat dalam pasal-pasal berdasarkan undang-undang dasar, sahnya keterangan saksi yang di sampaikan dilihat dari kualitas diri saksi dan penyebab saksi mengetahui kesaksiannya sehingga saksi berkewajiban untuk disumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan untuk menguatkan keterangannya. Kekuatan pembuktian yang bersifat bebas sehingga hakim bebas untuk menilai keterangan yang disampaikan para saksi untuk mengungkap pokok-pokok permasalahan yang sebenar-benarnya dengan pertimbangan yang cukup. Sedangkan dalam hukum Islam saksi dikenal dengan sebutan (*syahadah*) yakni orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami dan disaksikan tentang suatu peristiwa. Hukum mendatangkan saksi dengan memenuhi segala syarat merupakan keharusan. memberi kesaksian hukumnya *Fardhu ain'* seorang saksi harus memberikan kesaksiannya sebenar-benarnya dan tidak boleh menyembunyikannya dari apa yang dia ketahui. 2) Komparasi yang telah dilakukan terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti menurut hukum nasional dan hukum Islam, jika dilihat dari persamaannya sama-sama bertujuan agar keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dan pembuktian saksi berada diurutan kedua. Manakala dilihat dari sisi perbedaannya hukum nasional bersumber dari aturan perundang-undangan dan sebagai alat bukti. Sedangkan dalam hukum Islam bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah sehingga saksi dikatakan sebagai rukun yakni menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Kekuatan pembuktian keterangan saksi baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam seharusnya memerhatikan keterangan saksi pada saat menyampaikan keterangannya sebab psikologis dari seorang saksi sangat berpengaruh terhadap keterangan yang disampaikannya. 2) Walau terdapat perbedaan yang tidak cukup banyak dalam hukum nasional maupun hukum Islam kiranya dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Pentingnya keterangan saksi inilah yang membuat Allah pun melarang kepada orang yang menyimpan suatu informasi, sementara ia mengetahui informasi tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Karena masyarakat menghendaknya dalam kenyataan banyak yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan, mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan mereka telah melanggar dan dirasakan akibat mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.<sup>2</sup>

Istilah peradilan di Indonesia sebagai wadah untuk para pencari keadilan demi mendapatkan kepastian hukum terhadap perkara yang dialaminya. di negara Indonesia ini ada empat peradilan yang dikenal seperti pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer yang masing-masing fungsinya sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan terhadap problematika yang ada pada masyarakat agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan seperti

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Cet. III; Bandung: Nusa Media, 2013), h. 1.

<sup>2</sup>R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 65.

hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dalam putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.<sup>3</sup>

Dalam proses berperkara di pengadilan ada prosedur-prosedur yang telah disepakati bersama baik yang tertera dalam KUHAP, KUHAPerdata dan lain-lain, secara universal kita mengenal prosedur berperkara di pengadilan mulai dari pelaporan sampai putusan pengadilan dan bahkan masih ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh seperti banding, kasasi, maupun PK.

Dalam setiap peradilan yang ada khususnya di Indonesia adalah pembuktian dalam hal ini maka para penegak hukum akan berupaya semaksimal mungkin mengumpulkan alat bukti dari pemohon maupun termohon agar kebenaran materil dapat tercapai. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam yang memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di kemukakan.<sup>4</sup> Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses di pengadilan, karena dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang.

---

<sup>3</sup>Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7-8.

<sup>4</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 93.

di dalam perkara pidana setiap saksi harus dianggap cakap dan dapat dipaksakan karena merupakan kewajiban hukum, apabila saksi menolak untuk bersaksi maka saksi tersebut bisa di bawa dengan paksa ke persidangan. Berbeda dengan alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 KUH perdata.

prinsip menjadi saksi dalam perkara perdata bukan merupakan kewajiban hukum bersifat imperatif hanya sebatas pada keadaan tertentu yang digariskan pasal 139 ayat (1) dan pasal 143 HIR<sup>5</sup> yaitu dalam hal saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan, yang kedua karena saksi berdomisili di luar wilayah hukum PN yang memeriksa.

Pembuktian dalam hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. dalam hukum Islam, pembuktian disebut dengan al-bayyinah, secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar). Secara terminologi al-bayyinah adalah pembuktian suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan.<sup>6</sup>

Adapun dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2 : 282 yaitu :

---

<sup>5</sup>M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2007), h. 45.

<sup>6</sup>Sobhi Mahmasani, *Filsafatu at-tasyri' fi al-Islam, Terjemah Ahmad Sudjono Filsafat Hukum dalam Islam* (Bandung: PT. Alma Arif, 1976), h. 239.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ ۞

Terjemahnya :

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”.<sup>7</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah jika saksinya adalah dua orang laki-laki, masing-masing bisa bersaksi secara sendiri-sendiri. Tetapi jika saksinya adalah dua perempuan dan seorang laki-laki, kedua perempuan ini harus memberikan kesaksian bersama-sama, sebab yang menjadi alasan adalah perempuan karena kuatnya emosi yang mereka miliki, bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor lalu menyimpang dari jalan yang benar.<sup>8</sup>

Bayyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan syahadah yang berarti kesaksian. Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Al-bayyinah adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat di jadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan haq kepada pemiliknya. Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syamil Quran, 2011), h. 48.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 606.

Menurut kalangan Hanafiyah jumlah saksi dengan kriteria minimal saksi terdiri dari dua orang laki-laki dewasa, tetapi apabila tidak ada dua orang laki-laki maka dibolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang berkaitan dengan saksi adanya akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus, kecuali terkait dengan kasus hudud dan qais. Mazhab Syafi'i dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Saksi akad nikah, talak dan rujuk menurut kedua mazhab ini hanya dapat disaksikan minimal oleh dua orang saksi laki-laki dan tidak diterima saksi dari jenis kelamin perempuan.<sup>9</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana kedudukan saksi dalam hukum nasional dan hukum Islam (Studi Komparatif)?. Dari pokok masalah tersebut diperoleh sub permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum nasional dan hukum Islam?
2. Bagaimana sisi komparatif keterangan saksi dalam hukum nasional dan hukum Islam?

### **C. Pengertian Judul**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka akan dideskripsikan pengertian judul yang dianggap penting:

---

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* (Surabaya: Akbar Media, 2013), h. 348.

1. Kedudukan adalah letak atau tempat.<sup>10</sup>
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>11</sup>
3. Hukum Nasional adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.<sup>12</sup>
4. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).<sup>13</sup>
5. Komparatif adalah suatu hal yang bersifat dapat dibandingkan dengan suatu hal lainnya.<sup>14</sup>

Adapun operasional, pengertian yang dimaksud dalam skripsi ini ialah melihat kedudukan dari seorang saksi dalam menyampaikan suatu keterangannya yang benar dimuka sidang pengadilan dan melihat sisi perbandingan dari keduanya antar hukum nasional maupun hukum Islam.

---

<sup>10</sup>Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), h. 129.

<sup>11</sup>Marwan dan Jimmy.P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 550.

<sup>12</sup>Simorangking dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 66.

<sup>13</sup> Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.

<sup>14</sup>Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), h. 129.

#### **D. Kajian Pustaka**

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu tinjauan tentang kedudukan saksi dalam hukum nasional dan hukum Islam (studi komparatif). Banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan tersebut terutama buku-buku yang membahas tentang hukum acara pidana, sistem peradilan, teori pembuktian dan hukum Islam yang mengatur kesaksian yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist serta buku-buku yang terkait langsung dengan masalah tersebut. Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Eddy O.S. Hiariej, dalam bukunya *Teori dan Hukum Pembuktian* mengatakan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa dan pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang di pengadilan.<sup>15</sup> buku ini membahas mengenai teori-teori pembuktian dan alat-alat bukti yang termasuk. Namun dalam buku ini belum begitu terfokus membahas mengenai kedudukan saksi itu sendiri dalam menyampaikan keterangannya dimuka persidangan.
2. Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, dalam bukunya *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama* mengatakan bahwa kesaksian tidak hanya dilihat dari siapa yang menyampaikan, melainkan dilihat dari isi keterangan yang diberikan dan apabila keterangan yang diberikan adalah hal yang sebenarnya dan bahkan dapat dipertanggung jawabkan, maka kesaksian

---

<sup>15</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 4.



pun dapat diterima.<sup>16</sup> Buku ini membahas secara spesifik mengenai kesaksian laki-laki dan perempuan dalam peradilan agama. Namun ia tidak menyinggung sedikit pun perbandingan mengenai perbedaan saksi yang diatur oleh hukum nasional.

3. Bambang Waluyo, dalam bukunya *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* mengatakan bahwa pembuktian merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut di pergunakan, diajukan atau pun di pertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.<sup>17</sup> Buku ini membahas mengenai pembuktian yang ada dalam perkara pidana, perdata maupun ketatanegaraan yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun buku ini tidak begitu menguraikan secara jelas dari kedudukan saksi yang ada dalam proses peradilan.
4. Teguh Samudera dalam bukunya *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* mengatakan bahwa pembuktian dalam ilmu hukum, pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena walaupun sedikit ada terdapat unsur ketidakpastian. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif.<sup>18</sup> buku ini membahas bagaimana tata cara beracara dalam perkara perdata hingga alat bukti yang dimuat dan berlaku. Namun di dalam bukunya tidak menguraikan

---

<sup>16</sup> Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam* (Malang: Setara Press, 2015), h. 1.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 3.

<sup>18</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Cet. 2; Bandung: P.T. Alumni, 2004), h. 10.

secara terperinci alat bukti keterangan saksi berkedudukan dalam menyampaikan keterangannya.

5. Roihan A.Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Baru) mengatakan bahwa pembuktian di muka Pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting, sebagaimana diketahui bahwa Hukum Acara itu mengabdikan dan untuk terwujudnya hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama, dengan kata lain bagaimanapun wujudnya acara itu adalah tetap harus demi dan untuk tegak dan terpeliharanya hukum material Islam.<sup>19</sup> Namun di dalam bukunya hanya menguraikan sebagian dari pembuktian dalam proses beracara dalam lingkup peradilan agama sehingga penggunaan saksi juga tidak begitu diuraikan kedudukannya baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam itu sendiri.

Sehingga posisi peneliti dalam menyusun penelitiannya dalam hal ini lebih menguraikan sisi komparatif dari alat-alat bukti keterangan saksi dalam sistem peradilan yang dilihat dari hukum nasional dan hukum Islam.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sah) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses

---

<sup>19</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 9; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 137.

sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.<sup>20</sup> Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Dengan demikian, Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research* yang menggambarkan secara sistematis, normatif dan akurat terhadap objek yang menjadi permasalahan.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif adalah berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>21</sup>

### b. Pendekatan syar'i

Pendekatan syar'i adalah pendekatan yang menggunakan ilmu syariah terkhusus fiqh Islam yang terkait dengan kedudukan saksi dalam sistem peradilan Islam yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan.

---

<sup>20</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

<sup>21</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

### 3. Sumber Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan model tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>22</sup>

- a. Sumber hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Misalnya Al-Qur'an, Hadist, UUD 1945, UU, peraturan pemerintahan, Pancasila, yurisprudensi dan lainnya.
- b. Sumber hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) *Identifikasi* data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan kedudukan saksi dalam hukum nasional dan hukum Islam.
- 2) *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif

---

<sup>22</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 30.

dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.

- 3) *Editing* data adalah proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.<sup>23</sup>

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Tujuan Umum yaitu :

---

<sup>23</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 65.

Untuk mengetahui kedudukan saksi dalam hukum nasional dan hukum Islam (studi komparatif).

b) Tujuan khusus antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum nasional dan hukum Islam.
- 2) Untuk mengetahui komparasi alat bukti saksi dalam hukum nasional dan hukum Islam.

## 2. Kegunaan

a. Kegunaan teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai saksi. Dalam disiplin ilmu hukum Islam, penelitian ini memberi manfaat dalam menumbuhkan kesadaran terhadap seseorang yang memberikan kesaksiannya di persidangan dengan berkata sejujur-jujurnya dalam proses peradilan. Dengan mengetahui konsekuensinya sebagai saksi diharapkan para pembaca menyadari bahwa perbuatan ini tidak hanya melanggar norma agama tetapi juga melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

## b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada orang agar dalam melakukan suatu kesaksian harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah menurut hukum nasional dan hukum Islam.
- 3) Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar maupun pelajar mengenai kedudukan saksi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

#### A. *Pengertian Pembuktian*

Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”, secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan yang benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>24</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan atau meyakinkan.

Pengertian pembuktian menurut R. Subekti adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dilakukan dalam suatu persengketaan.<sup>25</sup> Selanjutnya M. Yahya Harahap juga mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), h. 151.

<sup>25</sup>R.Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 7.

<sup>26</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 273.

R. Supomo juga mendefinisikan pengertian dari pembuktian dalam dua arti yaitu pembuktian dalam arti luas yaitu membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. untuk itu membuktikan dalam arti yang luas berarti mempertkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>27</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian diantaranya yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang.
2. Pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
  - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif.
  - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal.

---

<sup>27</sup>R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 62-63.



3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak karena ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.<sup>28</sup>

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata, terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut:

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya.

Dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa mereka itu dalam sidang pengadilan. Jadi hakim tidak mencampuri terhadap hak-hak individu yang dilanggar, selama orang yang dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan.

Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h. 136-137.

dituduhkan kepada tertuduh. Jadi dalam hal ini kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>29</sup>

Menurut A.Mukti Arto, tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya persidangan di pengadilan. Berbagai pendapat dari para ahli hukum tentang arti pembuktian sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Dengan demikian nampak jelas bahwa pembuktian dalam ilmu hukum itu yang ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan dan bentrokan kepentingan atau pertentangan dalam sepanjang sejarah manusia akan selalu terjadi. Adanya masalah bentrokan kepentingan inilah yang biasanya disebut dengan perkara.

---

<sup>29</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), h. 32-33.

<sup>30</sup>A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 140.

## **B. Dasar Hukum Pembuktian**

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu sengketa atau suatu pelanggaran hak seseorang. Karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketanya dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip negara hukum penyelesaiannya melalui saluran hukum yaitu melalui gugatan kepengadilan.

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar sebagai tergugat ke pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya atau peristiwa yang menjadi sengketa (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).

Agar tuntutan dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali pihak lawannya (tergugat) terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut.

Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan, ternyata berhasil dibuktikan gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak.

Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan

pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.<sup>31</sup>

Pengaturan pembuktian dalam acara perdata bersifat materiil dan formil tercantum dalam *Het Herzeine Hedone Sisch Reglement* (HIR) dan *Rechtu Reglemeent Buitengewesten* (RBg). Khusus untuk pembuktian yang bersifat materiil tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) buku ke empat.

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan pasal 1865 BW. Bunyi ketiga pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yaitu:

“Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”.<sup>32</sup>

Sedangkan landasan pembuktian untuk perkara pidana didasarkan pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>33</sup>

Perlu pembuktian ini agar manusia tidak semauanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat.

### **C. Kewajiban Pembuktian**

Setiap sengketa yang diajukan di muka pengadilan setidaknya terdapat

---

<sup>31</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 138.

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945*, Buku ke IV , bab III.

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981* ,bab XVI.

dua pihak yang berperkara yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, sedangkan pihak tergugat adalah pihak yang mempertahankan kenyataan yang berlaku dan melawan gugatan itu.

Penggugat adalah orang yang tidak dapat dipaksa untuk meneruskan gugatannya, apabila dia tidak mau meneruskannya sedangkan tergugat adalah orang yang dapat dipaksa untuk menerima gugatan. Oleh sebab itu, membuktikan kebenaran gugatan adalah satu hal yang sangat dipentingkan oleh pengadilan, maka hakim harus mengetahui siapa yang wajib membuktikan kebenaran gugatannya. Apakah si penggugat atau si tergugat?<sup>34</sup>

Dalam hukum positif asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan pasal 1865 BW, yang berbunyi:

“Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

Pasal tersebut yang tertera diatas mengandung maksud bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sedangkan kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahan-bantahannya ia harus pula dikalahkan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>T.A. Hasbi ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: 1964), h. 105.

<sup>35</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 140.

Yang dimaksud diatas yaitu untuk kepentingan keadilan guna mencapai keseimbangan dalam pembagian beban pembuktian. di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya.<sup>36</sup> Pembagian beban pembuktian yang berat sebelah tentu akan memberatkan pihak yang dibebani pembuktian itu yang apabila tidak berhasil membuktikan pihak yang bersangkutan akan menderita kekalahan.

Adapun beban pembuktian yang disebutkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 75 yang berbunyi:<sup>37</sup>

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter”

Beban pembuktian menurut pasal ini diserahkan kepada tergugat, karena yang menjadi dasar gugatannya adalah karena adanya cacat badan atau penyakit. Oleh karenanya sudah barang tentu pihak tergugat wajib membuktikan bahwa dirinya apakah benar-benar cacat badan atau adanya penyakit yang dibolehkan untuk dijadikan alasan untuk bercerai.

Setelah diketahui kepada siapa kewajiban pembuktian itu diberikan, maka perlu juga diketahui hal-hal apa yang harus dibuktikan. Menurut R. Subekti hal-hal yang harus dibuktikan adalah “tidak hanya peristiwa saja tetapi juga suatu hak”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Ny.Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju), h. 58.

<sup>37</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* , bab IV.

<sup>38</sup>R.Subekti, *Hukum Pembuktian* ,h. 10.

Bahkan pendapat yang sama atau senada juga dikemukakan oleh Teguh Samudera yang menyatakan bahwa yang harus dibuktikan itu sesuatu hak atau peristiwa yang disangkal, jadi apabila pihak yang satu tidak menyangkal apa yang didalilkan pihak lainnya maka pihak yang tidak menyangkal dianggap disamakan dengan keadaan di mana ia memberikan pengakuan terhadap dalil itu. Akan tetapi kekuatan bukti dari sikap pihak yang tidak menyangkal tadi tidak bersifat mutlak.<sup>39</sup>

Dasar hukum atas pendapat mereka yang dikemukakan diatas adalah pasal 1865 KUH perdata yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Dasar hukum lainnya adalah pasal 163 HIR yang berbunyi: “ Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”.

Dari dua dasar hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan itu tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja tetapi juga suatu hak. Dalam praktek substantinya pembuktian ini diterapkan secara selektif dan tidak semua fakta-fakta hukum harus dibuktikan di persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di persidangan menurut Lilik Mulyadi mencakup mengenai hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, h. 22-23.

1. Pihak tergugat/para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan penggugat/para penggugat

Dalam konteks ini, hakim dibebaskan dari kewajibannya untuk membuktikan fakta-fakta yang diakui oleh tergugat/para tergugat. Jadi apa yang merupakan latar belakang pengakuan tergugat/para tergugat bagi hakim bukan merupakan persoalan dalam memutus perkara.

2. Pihak tergugat/para tergugat tidak menyangkal, surat gugatan penggugat/para penggugat

Oleh karena Hukum Acara Perdata Indonesia menganut asas kebenaran formal maka apabila pihak tergugat/para tergugat sama sekali tidak menyangkal atau membantah dalil-dalil penggugat/para penggugat maka dalam hal ini pihak tergugat/para tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil surat gugatan. Dalam praktek disamakan dengan tidak menyangkal gugatan ialah penyangkalan atas dasar alasan-alasan yang tidak cukup. Misalnya pihak tergugat/para tergugat hanya sekedar menyangkal atau membantah gugatan penggugat/para penggugat tanpa sama sekali diajukan alat-alat bukti lain guna memperkuat dalil-dalil bantahannya.

3. Apabila majelis hakim/hakim menjatuhkan putusan verstek. Dalam hal dijatuhkan putusan verstek (tanpa kehadiran tergugat/para tergugat kesemuanya) maka menurut ketentuan pasal 125 HIR/149 RBg, maka majelis hakim/hakim terlebih dahulu meneliti dalil-dalil gugatan penggugat/para penggugat, yang kemudian dalam putusannya mengabulkan surat gugatan.

Adapun salah satu alasan sebagai dasar pengaturan verstek ialah dalam proses perdata perlindungan kepada orang sepenuhnya diserahkan kepada mereka masing-masing. Sehingga apabila dalam proses ini tergugat/para tergugat telah dipanggil



secara patut dan resmi ternyata pada sidang pertama tergugat/para tergugat tidak hadir atau tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk membela kepentingannya, maka ia dapat dianggap tidak dapat atau tidak mau membantah dalil surat gugatan. Selintas lalu hal ini merupakan suatu keganjilan dan merupakan keadaan yang merugikan pihak tergugat/para tergugat, akan tetapi apabila diteliti ternyata bagi mereka yang diputus verstek dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) sebagaimana ditentukan pasal 129 HIR/pasal 153 RG.g

4. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah *decesoir*/sumpah pemutus

Dalam aspek ini tidak diperlukan proses pembuktian. Sumpah *decesoir* dapat dilakukan apabila selama proses pemeriksaan perkara perdata sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti untuk memperkuat suatu dalil (*Onmogelijkkheid van bewijis*, pasal 1936 KUH Perdata). Putusan hakim digantungkan terhadap siapa yang berani melakukannya akan dimenangkan oleh majelis hakim/hakim dalam putusannya.

5. Apabila majlis hakim/hakim karena jabatannya (*ex officio*) dianggap telah mengetahui fakta-faktanya.

Adapun maksud konteks adalah bahwa majlis hakim/hakim karena jabatannya telah mengetahui fakta-fakta tertentu dan kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh majlis hakim/hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. Hal ini dapat dibagi menjadi fakta-fakta prosesuil yaitu fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh majlis hakim/hakim yang bersangkutan seperti selama persidangan, pihak penggugat/tergugat tidak hadir dipersidangan pengakuan tergugat/para tergugat dalam persidangan, salah satu pihak mengangkat sumpah dan sebagainya serta fakta-fakta natoir (*natoire feiten,noticeable facts*) yaitu fakta-fakta yang telah diketahui umum seperti dalam

keadaan inflasi harga barang-barang mahal, hari minggu kantor-kantor tutup, laut dan langit berwarna biru dan sebagainya.<sup>40</sup>

#### **D. Teori Tentang Beban Pembuktian**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pasal 163 HIR dan pasal 283 RBg dapat disimpulkan bahwa yang harus membuktikan atau dibebani pembuktian adalah para pihak yakni pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama Penggugat yang mengajukan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya. Kalau Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus dikalahkan, sedangkan kalau Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, maka ia harus pula dikalahkan atau tidak dimenangkan.<sup>41</sup>

Jadi, beban pembuktian itu bukan terletak pada hakim melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Dengan demikian para pihaklah yang wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian atau fakta yang disengketakan itu dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Resiko pembuktian pada hakikatnya tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar risiko beban pembuktian itu tidak berat sebelah, maka hakim harus berhati-hati dalam menetapkan beban pembuktian tersebut dengan pembuktian secara seimbang dan patut serta tidak berat sebelah.

Tentang pembagian beban pembuktian banyak para pakar hukum yang memberikan komentarnya . salah satunya menurut Prof. DR.Sudikno Mertokusumo,

---

<sup>40</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia* (Jakarta: Jembatan, 1999), h. 151-152.

<sup>41</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 232.

SH menjelaskan bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum terdapat beberapa teori mengenai beban pembuktian yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya yaitu:<sup>42</sup>

a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloat affirmatief*)

Menurut teori ini, siapa yang mengajukan suatu hal maka ia harus membuktikannya, bukan pada pihak yang mengingkari atau yang menyangkal dalil yang diajukan oleh orang yang mengajukan suatu hal itu. Dasar hukum dari teori ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa segala yang bersifat negatif tidak mungkin dapat dibuktikan (*negative non sunt probanda*). Teori ini juga mengatakan bahwa peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin dapat dilakukan dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori ini sudah banyak ditinggalkan oleh para praktisi hukum, karena dianggap kurang efektif.

b. Teori hukum subjektif

Teori ini bertujuan untuk mempertahankan hukum subjektif dan selalu merupakan pelaksana hukum subjektif. Asas pembuktiannya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 163 HIR dan pasal 283 RBg yaitu siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu, harus tetap dipegang teguh.

Teori ini hanya dapat memberikan jawaban apabila gugatan Penggugat didasarkan kepada hukum subjektif. Teori ini terlalu banyak kesimpulan yang abstrak dan tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan tentang pembuktian dalam sengketa yang bersifat prosesuil. Teori ini juga tidak dapat memberikan solusi

---

<sup>42</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 233.

terhadap hal-hal yang timbul dalam masalah pembuktian ini dan teori ini juga sering menimbulkan ketidakadilan karena terlalu memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan pengalihan beban pembuktian.

c. Teori hukum objektif

Mengajukan gugatan atau tuntutan hak ke pengadilan berarti meminta kepada hakim agar menerapkan ketentuan undang-undang hukum objektif kepada peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan itu dan kemudian hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.

Hakim yang memeriksa perkara tersebut hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada. Jadi, atas dasar ini pula dapat ditentukan beban pembuktian.

d. Teori hukum publik

Menurut teori ini mencari kebenaran suatu peristiwa terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi kewenangan yang besar untuk mencari kebenaran di dalam hal pembuktian dari suatu perkara. Demikian juga para pihak yang berperkara dalam hal pembuktian ada kewajiban dengan hukum publik dengan alat-alat bukti yang sifatnya umum dan kewajiban itu harus disertai sanksi pidana.

e. Teori hukum acara

Teori ini didasarkan pada asas kedudukan prosesuil yang sama dari pihak-pihak yang berperkara di muka Majelis Hakim atau disebut asas audit et alteram part

Teori ini banyak dipergunakan oleh para praktisi hukum saat ini, karena dianggap lebih mendekati kepada prinsip keadilan dan kebenaran.

### **BAB III**

#### **MACAM-MACAM ALAT BUKTI**

##### **A. Menurut Hukum Nasional**

Untuk membuktikan suatu peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan.

Didalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang digunakan didalam persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alat-alat bukti menurut pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUH Perdata adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan ;
- d. Pengakuan;
- e. dan Sumpah.

Apabila diperlukan, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan di tempat dan penyelidikan orang ahli guna memvalidkan data yang diperlukan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 153 ayat (1) HIR yang berbunyi:

“jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari para dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan kepada hakim”.

---

<sup>43</sup>Republik Indonesia, *Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945*, Buku ke IV, bab III.

Juga disebutkan dalam pasal 154 HIR yang berbunyi :

“Jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya”.

Sedangkan menurut pasal 100 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan saksi;
- d. Pengakuan para pihak;
- e. Pengetahuan hakim.

Menurut Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 alat bukti yakni, sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Surat dan tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak;
- e. Petunjuk;
- f. Alat bukti dan berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam pasal 184 KUHP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari:<sup>46</sup>

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

<sup>44</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*, Pasal 100.

<sup>45</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003*, Pasal 36.

<sup>46</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, bab XVI, Pasal 184.

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. dan Keterangan terdakwa.

Undang-undang No 7 Tahun 1989 selain mengatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan agama didalamnya juga sekaligus mengatur tentang hukum acaranya. Hukum acara yang dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal.

Tidak semua hukum acara peradilan agama diatur secara lengkap dalam undang-undang bersangkutan, hal mana dapat dilihat pada ketentuan pasal 54 yang menentukan sebagai berikut:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang ditulis secara khusus dalam undang-undang ini”. Ketentuan tersebut menunjuk kepada hukum acara yang berlaku pada pengadilan negeri yaitu hukum acara perdata yang diatur dalam HIR untuk daerah Jawa dan Madura dan RBg untuk daerah seberang. Pengadilan agama memberlakukan HIR dan RBg sepanjang belum diatur dalam undang-undang bersangkutan. Misalnya mengenai alat-alat bukti tidak diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989.

Dengan demikian akan tampak hubungan hukum acara peradilan agama dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 dengan hukum acara perdata dalam HIR dan RBg hubungan kedua hukum yang dimaksud adalah undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagai hukum khusus (*lex specialis*) sedangkan HIR dan RBg sebagai hukum umum (*lex generalis*), maka ketentuan dalam HIR atau RBg tidak lagi dipergunakan.

Begitu pula dalam masalah pembuktian, apabila undang-undang sudah mengatur khusus acara pembuktian dengan sendirinya hakim tidak akan memberlakukan acara pembuktian dalam HIR atau RBg sebaliknya apabila acara pembuktian ada yang tidak diatur secara khusus, hakim akan mempergunakan HIR atau RBg sebagai hukum umumnya.<sup>47</sup>

Berikut ini untuk mengetahui alat-alat bukti secara jelas, maka penulis akan menguraikan masing-masing alat bukti tersebut, diantaranya:

a. Alat Bukti Tulisan/Surat

Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat tercantum dalam pasal 138, 165, 167 HIR/ pasal 164, 285-305 RBg dan pasal 1867-1894 BW serta pasal 138-147 RV. Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.<sup>48</sup>

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.

Bukti surat menurut Abdul Kadir Muhammad adalah merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 36.

<sup>48</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Cet. 2; Bandung: P.T. Alumni, 2004), h. 36.



Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti tulisan /surat ialah “ segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan ataupun meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis/surat.<sup>50</sup>

Alat bukti tulisan atau surat terbagi atas dua macam yaitu:

- a. Akta
- b. Tulisan atau surat-surat lain.

Akta ialah surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pembuatannya. Akta ini ada dua macam pula, yakni:

- a. Akta otentik dan
- b. Akta di bawah tangan.<sup>51</sup>

Berdasarkan definisi yang telah diurai diatas dapat dipahami atau disimpulkan bahwa suatu surat dapat dianggap sebagai akta bilamana memiliki ciri sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Aturan mengenai akta diatur dalam KUH Perdata pasal 1867 sampai dengan pasal 1880 dan dalam pasal 165, pasal 167 HIR. Akta otentik yaitu surat yang dibuat

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h. 151.

<sup>51</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 100.

menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisannya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu.

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, penitera pengadilan, pegawai pencatat nikah, pegawai pencatat sipil, jurusita dan hakim sebagainya.

Menyimak dari apa yang tercantum dalam pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPerdara, maka akta otentik dapat dibedakan lagi menjadi dua bentuk, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak.

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu yang mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, singkatnya pembuatan akta itu inisiatifnya datang dari pejabat itu sendiri bukan dari pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut tercantum dalam akta tersebut. Contohnya berita acara yang dibuat oleh panitera pengganti dipersidangan.

Sedangkan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu adalah akta yang mana pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukan nya. Dengan ini akta dibuat oleh para pihak dan inisiatifnya datang dari pihak yang memerlukannya. Contohnya di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan yang dibuat dengan maksud dijadikan sebagai bukti, tetapi tidak dengan perantaraan seorang pejabat umum.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2008), h. 109.

Berdasarkan ketentuan mengenai akta dibawah tangan diatur didalam pasal 1874 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan orang lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum”.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. hanya saja bila orang mengajukan suatu akta otentik maka ia tidak dibebani lagi pembuktian dan bagi siapa yang menyangkalnya maka harus mengadakan pembuktian. Sedangkan di dalam hal akta di bawah tangan kalau akta itu disangkal, maka orang yang mempergunakan akta itu harus dibebani pembuktian.

#### b. Alat Bukti Saksi

Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan, tidak ada dan atau pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi kesaksian adalah “kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan”.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang sebagai saksi (merupakan kesaksian) itu harus benar-benar keterangan tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dilihat dan atau dialami sendiri dan harus pula beralasan. Apabila seseorang saksi mengemukakan keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi dengan tidak beralasan dan berkesimpulannya sendiri adalah tidak

---

<sup>53</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 168.

dibolehkan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 171 HIR/ pasal 1907 KUHPerdara yang berbunyi:

1. Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi,
2. Perasaan atau sangka yang istimewa yang terjadi karena kata akal tidak dipandang sebagai penyaksian.<sup>54</sup>

Dengan demikian, bahwa jelaslah bahwa saksi tidak begitu saja memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasan-alasannya mengapa ia tahu.

Tentang kekuatan pembuktian dari kesaksian hanya seorang saksi menurut pasal 169 HIR/306 RBg/ 1905 BW berbunyi ketiga pasal itu pada intinya sama yaitu berbunyi : “Keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum”.

Kesaksian seorang saksi adalah tidak cukup untuk membuktikan sesuatu hal, untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti, keterangan saksi haruslah diikuti dengan alat-alat bukti lainnya.<sup>55</sup>

Keterangan seorang saksi saja, kalau dapat dipercaya oleh hakim bersama dengan satu alat bukti lainnya baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya dalam persangkaan atau pengakuan tergugat. Hakim dapat pula membebani sumpah pada salah satu pihak bila pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya.

Agar peristiwa itu terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi itu harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat,

---

<sup>54</sup>Republik Indonesia, *Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945*, Buku ke IV , bab III.

<sup>55</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 115.

persangkaan, pengakuan atau sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, maka pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian meskipun ada dua orang saksi, suatu peristiwa dapat dikatakan meyakinkan apabila hakim mempercayai kejujuran saksi-saksi tersebut.<sup>56</sup>

Untuk dapat memakai keterangan saksi sebagai bukti, hakim harus percaya pada kebenaran keterangan saksi itu dan dalam hal ini jumlah dua orang merupakan minimum. Meskipun ada banyak orang saksi kalau mereka semua tidak dapat dipercaya oleh hakim maka keterangan mereka semua itu tidak berguna sama sekali. Tetapi ketiadaan kepercayaan ini harus beralasan yang tepat.

Tentang saksi *Testimonium de auditu*, menurut Retno wulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata ialah dalam bahasa Indonesia berarti kesaksian dari pendengaran juga disebut kesaksian *de auditu* yaitu keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut. Sebagai kesaksian keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, hanya dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau sebagai sumber persangkaan dan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai.

#### c. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR/RBg dalam pasal ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan persangkaan itu. Secara terperinci alat bukti persangkaan ini telah diatur dalam pasal 1915 sampai dengan pasal 1922 KUHPerdara. Pasal 1915 menyatakan bahwa: “Persangkaan-persangkaan ialah

---

<sup>56</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, h. 103.

kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah peristiwa yang tidak terkenal”.

Berdasarkan pasal tersebut maka persangkaan berarti dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan berdasarkan hakim.

Persangkaan menurut undang-undang tercantum dalam pasal 1916 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut persangkaan menurut undang-undang didefinisikan dengan persangkaan yang didasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam itu antara lain:

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifatnya dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
- b. Peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan harta.
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa seorang hakim dalam menggunakan alat bukti persangkaan akan terikat dengan undang-undang.

Adapun persangkaan yang berdasarkan keyakinan hakim ditentukan dalam pasal 1922 KUHPerdara yang berbunyi bahwa: “Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memerhatikan persangkaan-

persangkaan lain selainnya yang penting, teliti, tertentu dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal di mana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu fakta berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa persangkaan itu bukanlah sebagai alat bukti yang dijadikan alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat-alat bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat-surat atau pengakuan suatu pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang dan nyata misalnya karena ada peristiwa A dianggap juga ada peristiwa B. Kesimpulannya dapat ditarik oleh undang-undang sendiri atau hakim.<sup>57</sup>

Didalam alat bukti persangkaan ini, suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung, artinya melalui atau dengan perantaraan pembuktian peristiwa-peristiwa lain, sedangkan bukti tulisan atau kesaksian lazimnya dilakukan pembuktian secara langsung artinya tidak dengan perantaraan alat-alat bukti lain.

#### d. Alat Bukti Pengakuan

Didalam hukum acara perdata pengakuan dapat diartikan sebagai suatu pernyataan akan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa, tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya. Pengakuan itu meliputi pernyataan akan kebenaran dari tuntutan, hubungan hukum dan peristiwa.

Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal-pasal 174 s.d 176 HIR/311 s.d 313 RBg/1923 s.d 1928 KUHPerdata. Menurut R. Subekti, sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang

---

<sup>57</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 116.

dikemukakan oleh salah satu pihak diakui oleh pihak lain, maka pihak yang mengajukan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya. Dengan demikian dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil-dalil yang dikemukakan itu diakui dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan.<sup>58</sup>

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan undang-undang mengenai pengakuan, jelas bahwa pengakuan tidak dapat dipisah-pisahkan melainkan harus diterima seluruhnya, maka ketentuan ini hanya dapat diterapkan pada pengakuan yang murni karena pada pengakuan ini benar-benar membenarkan dalil gugatan penggugat.

#### e. Alat Bukti Sumpah

Sumpah pada umumnya diartikan sebagai pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Dalam hukum positif (hukum acara perdata) alat bukti sumpah diatur dalam pasal 155 s.d 158 dan 177 HIR/182 s.d 185 dan 314 RBg/1929 s.d 1945 KUHPerdata. Sedangkan dalam hukum acara pidana alat bukti sumpah diatur dalam pasal 184 KUHP.

---

<sup>58</sup>R.Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 109.



Sehingga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum positif telah diatur dan disusun dalam undang-undang itu sendiri dan pembagiannya juga telah dituliskan didalamnya.

Menurut R.Subekti ada dua macam sumpah di muka hakim, yaitu:<sup>59</sup>

1. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya. Sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau sumpah penentu (sumpah *decisoir*).
2. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak. Sumpah ini dinamakan sumpah tambahan (sumpah *supplitoir*).

Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam segala persengketaan yang berupa apa saja, termasuk hal-hal dimana para pihak tidak mampu mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak diakui. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkaranya, bahkan sampai tidak ada bukti sama sekali.

f. Alat Bukti Keterangan Ahli

Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.

Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur dalam pasal 154 HIR, 181 RBg dan 215 Rv mengatakan jika menurut pertimbangan pengadilan bahwa perkara itu dapat menjadi lebih jelas kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya. Keterangan ahli dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan dengan dikuatkan keterangannya dengan sumpah.

---

<sup>59</sup>R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, h. 115.

Jika seorang ahli tinggal atau berdiam di luar daerah hukum kedudukan pengadilan, maka atas permintaan ketua pengadilan, keterangan itu diberikan di tempat seorang ahli itu tinggal atau berdiam selanjutnya seorang ahli itu disumpah oleh pemerintah di tempatnya juga, berita acara pemeriksaan dikirimkan segera kepada ketua. Berita acara itu dibacakan di dalam persidangan. (pasal 181 (3) RBg) Pengadilan negeri tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat seorang ahli, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya. (pasal 154 (4) HIR/181 RBg).

Baik ahli maupun saksi adalah pihak ketiga dalam proses pemeriksaan dipersidangan. Namun demikian, kedua alat bukti ini memiliki beberapa perbedaan prinsip dalam beberapa hal berikut ini, diantaranya:

1. Aspek pergantian

Kedudukan seorang ahli dapat digantikan oleh ahli lain untuk memberikan keterangan atau pendapatnya di persidangan. Sedangkan untuk saksi tidak diperkenankan adanya pergantian dengan saksi lain, kecuali untuk peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang, sehingga bila seorang saksi berhalangan dapat diganti oleh saksi lain untuk memberikan keterangannya di persidangan.

2. Aspek keahlian

Untuk ahli biasanya diharuskan memiliki keahlian tertentu yang relevan dengan peristiwa yang sedang disengketakan, sedangkan saksi tidak diperlukan memiliki keahlian tertentu.

3. Aspek substansi

Saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dialaminya sendiri berkaitan dengan peristiwa yang disengketakan, sedangkan ahli memberikan pendapat atau kesimpulan tentang suatu peristiwa yang disengketakan tersebut.

4. Aspek cara menyampaikan

Saksi harus memberikan keterangan secara lisan di pengadilan, keterangan saksi yang tertulis dianggap sebagai alat bukti tertulis, sedangkan keterangan ahli yang ditulis tidak termasuk dalam alat bukti tersebut.

5. Aspek posisi hakim

Hakim terikat untuk mendengarkan saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevan sedangkan ahli, hakim bebas untuk mendengarnya atau tidak.<sup>60</sup>

Jadi, baik semua keterangan ahli dan saksi di persidangan harus dicatat dalam berita acara persidangan. Bila keterangan ahli yang telah dicatat dalam berita acara tidak digunakan oleh hakim, maka hakim harus menjelaskan alasannya dalam putusannya kenapa hal tersebut dilakukan.

**B. Menurut Hukum Islam**

Alat –alat bukti (*hujjah*) ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Menurut para fuqaha, alat bukti itu ada 7 macam yaitu:<sup>61</sup>

1. Al Iqrar
2. Al Bayyinah
3. Al Yamin
4. An Nukul
5. Al Qasamah
6. Keyakinan Hakim
7. Qorinah

---

<sup>60</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h. 97-98.

<sup>61</sup>Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 134.

Menurut Samir ‘Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam urutan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Qorinah
5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
6. Pengetahuan hakim.

Menurut ‘Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan urutan sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Penolakan sumpah
5. Pengetahuan hakim
6. Qorinah
7. Qosamah
8. Qiyafah
9. Qur’ah.

Menurut Sayyid Sabiq alat-alat bukti itu ada empat, dengan urutan sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Pengakuan

---

<sup>62</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 56.

<sup>63</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, h. 57.

2. Saksi
3. Sumpah
4. Surat resmi.

Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, alat-alat bukti itu ada dua puluh enam, dengan urutan sebagai berikut:

1. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah.
2. Pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat.
3. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya.
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
5. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
6. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat.
7. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat.
8. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
9. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.
10. Keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah penggugat.
11. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah.
12. Saksi tiga orang laki-laki.
13. Saksi empat orang laki-laki.
14. Kesaksian budak.
15. Kesaksian anak-anak di bawah umur (sudah mumayyiz).
16. Kesaksian orang yang fasiq.
17. Kesaksian orang non Islam.
18. Bukti pengakuan.
19. Pengetahuan hakim.

20. Berdasarkan berita mutawatir.
21. Berdasarkan berita tersebar (*khobar istifadloh*).
22. Berdasar berita orang perorang.
23. Bukti tulisan.
24. Berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak.
25. Berdasarkan hasil undian.
26. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.

Menurut Nashr Fariid Waashil alat-alat bukti itu ada sebelas, dengan urutan sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Pengembalian sumpah
5. Penolakan sumpah
6. Tulisan
7. Saksi ahli
8. Qorinah
9. Pendapat ahli
10. Pemeriksaan setempat
11. dan Permintaan keterangan orang yang bersengketa.

Ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain:

1. *Iqrar* (pengakuan)

---

<sup>64</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, h. 58.

2. *Syahadah* (saksi)
3. *Yamin* (sumpah)
4. *Riddah* (murtad)
5. *Maktubah* (bukti tertulis)
6. *Tabayyun* (pemeriksaan koneksitas)
7. Alat bukti untuk bidang pidana.

Dalam tulisan ini hanya akan dibahas alat-alat bukti yang ada dalam kaitannya dengan sistem peradilan agama di Indonesia. Diantaranya yaitu:

1. *Iqrar* (pengakuan)

*Iqrar* yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang diri sendiri yang bersifat dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ikrar atau pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau diluar persidangan.

Adapun syarat-syarat pelaku ikrar, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Baliqh : dewasa,
- b. Aqil : berakal/waras, tidak gila,
- c. Rasyid : punya kecakapan bertindak.

Jenis-jenis ikrar, diantaranya:

- a. Lisan,
- b. Isyarat, kecuali dalam perkara zina,
- c. Tertulis.

2. *Syahadah* (saksi)

---

<sup>65</sup>Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 135.

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri. Sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

Syarat-syarat untuk menjadi saksi yaitu:

- a. Muslim
- b. Sehat akal
- c. Baliqh
- d. Tidak fasik.
3. *Yamin* (sumpah)

Sumpah lebih dikenal dengan sebutan “yamin”. Dinamakan demikian karena yamin lebih bermakna kekuatan. Karena itu salah satu tangan disebut dengan yamin karena lebih kuatnya dari pada yang lain. Sehingga makna sumpah (*yamin*) mengandung unsur *ilahiyah*, karena di dalamnya mempunyai keterkaitan atas apa yang telah diucapkannya dengan penuh pertanggungjawaban.<sup>66</sup>

Alat-alat sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimana pun selain dari pada sumpah li'an dan sumpah pemutus, ia tidak bisa berdiri sendiri artinya hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya.<sup>67</sup>

Adapun fungsi sumpah dan nilai pembuktiannya, yaitu:

1. Memberikan rasa takut, emosional sugesti, kepada terdakwa akan akibat sumpah palsu sehingga akan mendorongnya memberi pengakuan secara jujur.

---

<sup>66</sup>Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h.136.

<sup>67</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 9; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 181.



2. Dengan menolak bersumpah, terdakwa/tergugat menjadi pihak yang dikalahkan karena nilai pembuktian penolakannya itu menempati kedudukan pengkauan.
4. *Maktubah* (Bukti-bukti tertulis)

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud di sini terdiri atas dua hal, yaitu akta dan surat keterangan.

- a. Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompetensi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim pengadilan agama.
- b. Surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan yang dimaksud misalnya adalah surat keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa.<sup>68</sup>
5. *Tabayun* (Limpahan pemeriksaan)

Tabayun adalah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan yang sudah memeriksa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

---

<sup>68</sup>Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 142.

## BAB IV

### ANALISIS KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

#### A. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam*

Kesaksian adalah “keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi”.<sup>69</sup> Artinya adalah suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan.<sup>70</sup>

Keterangan yang pasti atau meyakinkan dimaksud sudah tentu yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang dilihatnya sendiri.<sup>71</sup> Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.

Berdasarkan deskripsi pengertian kesaksian bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi. Kehadiran saksi adalah untuk memberikan keterangan terhadap apa yang telah dilihatnya melalui kasat mata terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu sebelumnya.

---

<sup>69</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Cet. II; Bandung: Alumni, 2004), h. 74.

<sup>70</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1247.

<sup>71</sup>Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian* (Malang: Setara Press, 2015), h. 6.

Saksi adalah a. orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa (kejadian); b. orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut; c. orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; d. keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; e. bukti kebenaran.<sup>72</sup>

Bahkan didalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat, mendengar, merasakan sendiri suatu kejadian baik itu dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

Dalam buku keempat KUHPerdata perihal pembuktian dan daluwarsa, tidak ada definisi mengenai apa yang dimaksud dengan saksi. Pasal 1895 sampai 1914 KUHPerdata yang mengatur tentang saksi hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan saksi. Hal ini beda dengan ketentuan dalam KUHP yang memberikan definisi saksi dan definisi keterangan saksi. Menurut Ian Dennis ada lima hal yang terkait sahny suatu keterangan saksi.

1. Kualitas pribadi saksi
2. Hal yang diterangkan saksi
3. Penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya
4. Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan pengadilan
5. Adanya hubungan antara ini keterangan saksi dengan ini keterangan saksi lain atau alat bukti lain.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Girjil Glase, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 202; dikutip dalam Ibnu Elmi As Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian* (Malang; Setara Press, 2015), h. 7.

<sup>73</sup>Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2006), h. 39-40.

Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tertulis dan atau pembuktian dengan tulisan tidak cukup. Yang dimaksudkan dengan alat pembuktian dengan saksi itu adalah kesaksian, kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula, karena sudah sewajarnya didalam pemeriksaan suatu perkara dipersidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari para pihak yang berperkara.

Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara yang di panggil dipersidangan.<sup>74</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa saksi tidak begitu saja memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasan-alasannya mengapa ia tahu. Jadi ia harus memberikan pun alasan-alasan tentang keterangan dan hal-hal yang ia lihat dan atau dialaminya. juga keterangan saksi itu harus dikemukakan dengan secara pribadi di muka persidangan, tidak boleh secara tertulis dan diwakili orang lain, demikian hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 140 (1) dan Pasal 148 HIR yang menentukan bahwa jika saksi-saksi yang dipanggil dan tidak datang serta bagi saksi-saksi yang datang dipersidangan tidak mau memberikan keterangan, maka ia dikenakan sanksi.

Saksi (saksi-saksi) yang dipanggil dimuka sidang pengadilan mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum, yaitu antara lain:

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h. 112.

1. Kewajiban untuk menghadap atau datang memenuhi panggilan dipersidangan dengan catatan setelah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum (pasal 139, 140 dan 141 HIR);
2. Kewajiban untuk bersumpah sebelum mengemukakan keterangan. Sumpah tersebut dilakukan menurut agamanya dan bagi suatu agama yang melarang bersumpah dapat diganti dengan mengucapkan janji (147 dan 148 HIR);
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar (Pasal 148 HIR).<sup>75</sup>

Kewajiban menurut hukum dimaksudkan karena apabila hal tersebut tidak dipenuhi, saksi dapat dikenakan sanksi dan bahkan dapat dipaksa oleh polisi untuk menghadap kepersidangan. Tentang saksi-saksi tersebut diatur dalam pasal 140 dan 141 HIR.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesaksian adalah keterangan pasti yang wajib dikemukakan kepada hakim oleh orang lain yang mengetahui dan atau mengalami sendiri hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan jalan memberitahukan sendiri secara lisan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, h. 60.

<sup>76</sup>Eddy O.S Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 61.

Berdasarkan beberapa pengertian maka saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau pernyataan yang pasti karena orang tersebut mengetahui kejadian yang sebenarnya dan bahkan makna lain dari saksi adalah orang yang diminta hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa. Orang yang diminta menjadi saksi tersebut adalah orang yang mencukupi syarat dan dipandang memahami dengan baik terhadap apa yang disaksikannya.

1. Nilai keterangan saksi

Hakim bebas dalam membentuk pendapatnya, termasuk juga dalam menggunakan alat-alat pembuktian, antara lain keterangan saksi (saksi-saksi).<sup>77</sup>

Keterangan seorang saksi tanpa adanya tambahan dari alat bukti lainnya, tidak lagi dapat dipercaya, demikian dapat diambil dari kesimpulan dari pasal 169 HIR (pasal 1905 KUHPerdara). Tentang tidak dipercayanya keterangan dari seorang saksi tidak hanya didasarkan bahwa biasanya seseorang itu yang dengan sengaja berbicara tidak benar, tetapi juga pada pertimbangan bahwa saksi itu manusia, kemampuannya terbatas, juga ingatannya, maka didasarkan juga pada kemampuan ingatan manusia yang terbatas. Apabila seseorang yang berada dibawah atau diatas kesadarannya, akan tidak baiklah hasil pengamatan atau yang dialami sendiri.

Walaupun hakim diberi kebebasan dalam menilai keterangan saksi, tetapi dengan adanya ketentuan pasal 169 HIR (pasal 1905 KUHPerdara) kebebasan tersebut dibatasi. Hal tersebut tidak mutlak ditaati, lebih-lebih mengingat kemajuan zaman, dalam hal tertentu tidak perlu mengikuti pasal 1905 KUHPerdara, misalnya dalam hal jual beli yang didasarkan saling kepercayaan semata-mata, juga dengan

---

<sup>77</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, h. 61.

mengingat mencari saksi yang dengan cuma-cuma adalah sulit, biasanya disaat sekarang saksi meminta bayaran yang mahal.

Ketentuan pasal 1905 KUHPerdata mengundang adanya tambahan alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi. Dengan demikian, apabila ada alat pembuktian lain maka hakim dapat, terhadap keterangan satu orang saksi memberikan arti yang lengkap. Jadi apabila persangkaan dan atau sumpah tambahan dianggap alat pembuktian, maka keterangan satu saksi ditambah dengan persangkaan ataupun sumpah tambahan, sudah memberi arti yang cukup dalam kekuatan pembuktian keterangan satu saksi bagi hakim. Dapat dikatakan sebagai berikut, saksi + sangka/saksi+sumpah tambahan adalah cukup untuk menganggap hal yang diajukan sebagai sudah terbukti.

Walaupun pasal 1905 KUHPerdata melarang hakim dalam memberi arti terhadap keterangan satu saksi, tidak berarti bahwa keterangan tersebut sama sekali tidak ada nilainya, tetapi keterangan tersebut dapat menjadi gagasan sebagai bahan pandangan hakim dalam menyelesaikan perkara dan juga tidak berarti bahwa hakim dilarang menarik bukti dari keterangan saksi-saksi yang apabila dari beberapa keterangan tersebut menunjukkan suatu fakta yang berhubungan dengan pokok persoalan.

Hakim dalam menilai alat pembuktian saksi, berdasarkan pasal 1908 KUHPerdata (pasal 172 HIR) diharuskan memperhatikan kesamaan atau persesuaian antara keterangan para saksi; persesuaian antara keterangan-keterangan dengan apa yang diketahui dengan sisi lain perkara; sebab-sebab yang mendorong para saksi mengemukakan keterangannya, pada cara hidupnya, kesusilaannya, kedudukan para saksi dan segala apa yang berhubungan keterangan yang dikemukakan.

Ketentuan pasal 1908 KUHPerdara dan pasal 172 HIR sekedar merupakan lampu petunjuk bagi hakim dalam melakukan penilaian. Bahkan, hakim sebenarnya harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal lain (lebih banyak lagi) yang ada sangkut pautnya dengan perkara dengan melihat kasus per kasus.<sup>78</sup>

Oleh karena itu, penilaiannya diserahkan kepada pandangan hakim (mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas) terhadap alat pembuktian. Keterangan saksi yang tidak diikuti dengan alasan-alasan sampai ia mengetahui hal ini tidak dapat dimaksudkan dalam alat pembuktian saksi lengkap. Kesaksian hanyalah merupakan pemberitahuan dari orang-orang yang mengetahui peristiwanya dengan mata kepala sendiri, maka keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksian.

## 2. Yang termasuk dalam kesaksian

Menurut pasal 1907 KUH Perdata yang menentukan bahwa pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang didapat dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian.<sup>79</sup> Jadi, orang yang memberitahukan kesaksian itu hanya terhadap hal-hal yang dapat diterima oleh panca indra dan hal-hal yang dapat diketahui sendiri. Kesimpulan atau suatu pendapat pribadi tidak boleh dianggap sebagai keterangan saksi. Oleh karena itu, seseorang selaku saksi tidak boleh mengemukakan pendapatnya, bahwa si A mabuk, si D mengigau akan tetapi untuk hal itu dapat dikemukakan sebagai bahwa ia melihat si A berjalan sempoyongan, si D berbicara tak menentu.

---

<sup>78</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, h. 62.

<sup>79</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, h. 63.



Dari keterangan yang dikemukakan oleh saksi tersebut, hakim akan menarik kesimpulan bahwa si A dalam keadaan mabuk, si D mengigau. Jadi, yang dikemukakan saksi itu hanya fakta-fakta yang dapat diterima dengan panca indra dan dari fakta-fakta tersebut hakim yang menyimpulkan untuk menentukan jenisnya.

Saksi juga tidak boleh menggunakan keterangan menurut saya, maksud si A, kemauan si B, C marah, atau saya mengetahui, D dalam perbuatannya dalam beritikad baik dan sebagainya yang kesemuanya tidak dapat diterima dengan panca indra, karena keterangan itu menyangkut perasaan, pemikiran dan getaran jiwa dari seseorang. Disini dimaksud bahwa saksi tidak boleh menerangkan bahwa C marah, maksud A mengingkari pelaksanaan prestasi, tetapi dapat dikemukakan bahwa ia terperanjat melihat tingkah laku dan sikap C, ia melihat A membayar utangnya ditunda-tunda selalu dan selalu memberikan alasan berbelit-belit.<sup>80</sup>

Sehubungan dengan uraian diatas, keterangan dari saksi yang mengemukakan tentang pendapatnya belaka, misal saksi ahli? disinilah yang merupakan pengecualiannya dan disini terdapat letak perbedaan antara keterangan yang dikemukakan antara saksi dan saksi ahli. Perbedaan itu dapat dikatakan bahwa:

- a. Seseorang (beberapa) saksi dipanggil kemuka pengadilan itu untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri guna menjelaskan terjadinya suatu peristiwa, yang berguna sebagai tambahan hakim dalam menilai peristiwa dan keterangan saksi harus secara lisan.
- b. Seseorang (beberapa) saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan itu untuk mengemukakan keterangannya berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa,

---

<sup>80</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, h. 64.

yang berguna untuk membantu hakim dalam menilai peristiwa tersebut dan keterangan saksi ahli bisa secara lisan maupun tertulis.

Seseorang yang diperintahkan oleh undang-undang atau hakim untuk menilai suatu masalah adalah bukan sembarang orang melainkan hanya orang-orang yang telah benar memahami dan pasti mengetahui masalah yang dimaksud. Jadi orang yang diperintah itu pun seseorang yang ahli dalam bidangnya.

Mengenai kesaksian yang didengar atau diperoleh dari pihak lain keterangan ini dikemukakan dengan lisan tentang hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi akan tetapi didengar dan diketahui oleh pihak lain.

### 3. Yang dapat bertindak sebagai saksi

Pada dasarnya semua orang cakap bertindak sebagai saksi apabila telah dipanggil dan sah dengan patut menurut hukum, wajiblah ia mengemukakan kesaksian di muka pengadilan (pasal 1909 (1) KUH perdata, pasal 139 HIR). Bahkan apabila ia tidak datang atau datang tetapi tidak ingin memberikan kesaksian, ia dapat dikenakan sanksi-sanksi. Walaupun demikian terhadap asas tersebut dibuka suatu pengecualian atau penyimpangan.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dibedakan dalam dua golongan yaitu orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi dan orang yang karena permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Golongan yang disebut pertama masih dapat dibedakan lagi kedalam golongan yang secara mutlak dianggap sebagai tidak mampu bertindak sebagai saksi dan golongan yang secara relatif dianggap sebagai tidak mampu bertindak sebagai saksi.

Adapun golongan-golongan yang ditolak kesaksiannya dimuka persidangan, sehingga yang dapat bertindak sebagai saksi sebagai berikut.

- a. Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu:<sup>81</sup>

1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dan salah satu pihak (Pasal 145 (1) sub 1e HIR, Pasal 1910 (1) KUH Perdata). Larangan ini dalam pembentuk undang-undang didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka itu tidak akan cukup objektif dalam memberi keterangan, untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik, untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbul rasa dendam diantara mereka. Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka mampu untuk bertindak sebagai saksi:

- a. Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak.
  - b. Dalam perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan yang belum dewasa.
  - c. Dalam perkara mengenai alasan yang menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian.
  - d. Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan (Pasal 145 (2) HIR, 1910 (2) KUH Perdata)
  - e. Suami atau istri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 (1) sub 2 e HIR, Pasal 1910 (1) KUH Perdata)
- b. Golongan yang secara relatif tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu:<sup>82</sup>

1) anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun (Pasal 145 (1) sub 3 e jo (4) HIR, Pasal 1912 (1) KUH Perdata),

---

<sup>81</sup>Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa* (Cet. 1; Jakarta: Intermasa, 1978), h. 117.

<sup>82</sup>Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, h. 118.

- 2) orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang-kadang dalam ingatannya terang (Pasal 145 (1) sub 4 c HIR, Pasal 1912 KUH Perdata). Dalam hal pasal 1912 (2) KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah dan keterangan-keterangan mereka dianggap sebagai penjelas belaka.
- 3) orang yang karena permintaannya sendiri dibebaskan dengan kewajibannya sebagai saksi.

Yang termasuk dalam golongan ini ialah:<sup>83</sup>

- (a) Saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak.
- (b) Keluarga sedarah maupun menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki atau perempuan dan laki-laki atau istri salah satu pihak. “Dasar pemikiran dibebaskannya golongan ini adalah karena ia tidak akan memberikan banyak bahan untuk dibicarakan”.
- (c) Orang-orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatan yang sah, diwajibkan merahasiakan akan tetapi semata mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan padanya (pasal 146 HIR, Pasal 1909 (2) KUH Perdata).

Dalam ketentuan tersebut dalam point c terdapat keganjilan yaitu di satu pihak mereka dibebaskan sebagai saksi tetapi di lain pihak lagi mereka diwajibkan menyimpan rahasia. Melihat bahwa kewajiban menyimpan rahasia disebabkan adanya sesuatu yang melekat padanya secara sah, misalnya dokter, advokat, dan pegawai umum.

---

<sup>83</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 97.

Jika benar secara mutlak berhak mengundurkan diri sebagai saksi, maka berarti bahwa ia karena jabatannya melindungi orang-orang tertentu yang berhubungan dengan jabatannya saja.

Dengan demikian, tentang kewajiban memberikan keterangan dan atau hak mengundurkan diri dari orang-orang tersebut yang karena jabatannya itu bergantung kepada kasus perkasus penggunaannya karena apabila hak mengundurkan diri sebagai saksi diikuti secara mutlak dapat merugikan masyarakat, setiap orang akan beranggapan bahwa pekerjaan itu adalah penting dalam masyarakat yang selanjutnya berarti mempunyai kewajiban merahasiakan yang membawa konsekuensi ia berhak menarik diri dari kewajiban sebagai saksi.

Dalam ketentuan undang-undang sendiri tidak ditegaskan mengenai martabat, pekerjaan, jabatan mana yang digolongkan dalam kewajiban untuk menyimpan rahasia dan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengingat perkembangan zaman dengan segala kepandaian manusia dewasa. Apabila dalam undang-undang disebutkan secara tegas dan jelas tentang martabat, pekerjaan dan jabatan yang berkewajiban menyimpan rahasia dan penting di dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 146 HIR dan pasal 1909 (2) KUH Perdata.

#### 4. Kewajiban sebagai saksi

##### a. Kewajiban untuk menghadap

Didalam proses pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan negeri pada dasarnya diperlukan saksi.<sup>84</sup> Pada pasal 121 (1) HIR ditentukan bahwa sebelum perkara diperiksa di muka sidang pengadilan negeri, pengadilan (hakim) menyuruh memanggil para pihak dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang telah

---

<sup>84</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, h. 70.

ditentukan. Akan tetapi apabila dengan aturan Pasal 121 (1) HIR saksi tidak dapat menghadap karena tidak mau atau sebab lainnya, sedangkan kesaksiannya itu benar dibutuhkan meneguhkan kebenaran tuntutan penggugat dan atau perlawanan tergugat, maka hakim menyuruh memanggil saksi lagi agar menghadap di hari persidangan yang akan datang, demikian dapat disimpulkan dari pasal 139 HIR.

Selanjutnya apabila ketentuan pasal 121 (1), 139 HIR telah dijalankan tetapi saksi masih juga tidak datang menghadap, maka menurut Pasal 140 HIR saksi yang tidak mau datang menghadap (setelah dipanggil dua kali) dihukum membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan harus dipanggil satu kali dengan menggunakan biaya saksi sendiri.

Apabila dengan panggilan yang menggunakan biaya saksi sendiri, ia masih tidak mau menghadap maka ia disamping harus membayar segala biaya yang dikeluarkan juga harus membayar segala kerugian yang diderita para pihak yang bersengketa akibat dari tidak menghadapnya itu. Serta saksi tersebut dapat dipaksa oleh polisi agar datang menghadap ke persidangan. Pembasan dari hukuman-hukuman termaksud hanya dapat dilakukan apabila ketentuan dari pasal 142 (adanya alasan yang sah) dan pasal 143 (Pengadilan negeri di luar dari saksi) dipenuhi.

Jika saksi datang ke pengadilan untuk memenuhi surat panggilan, maka ia dipanggil masuk ke dalam ruangan persidangan satu persatu dan akan ditanya nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan apakah ia ada hubungan perburuhan dengan salah satu pihak (Pasal 144 HIR).<sup>85</sup>

Penerapan menghadirkan saksi secara paksa yang dibarengi dengan hukuman membayar biaya dan diganti rugi digariskan Pasal 140 dan 141 HIR, apabila

---

<sup>85</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, h. 71.

keingkaran memenuhi itu mendasar alasan yang tidak sah atau pun tanpa alasan. Akan tetapi, apabila tidak hadirnya saksi memenuhi panggilan disebabkan dengan alasan yang sah, hakim wajib menghapuskan hukuman yang dijatuhkan kepada saksi.

Ketentuan pasal 142 HIR dapat dimanfaatkan saksi, dia harus mampu membuktikan tentang kebenaran alasan yang menyebabkan tidak dapat hadir memenuhi panggilan.<sup>86</sup> Berdasarkan teori dan praktik, alasan yang dianggap sah tidak memenuhi panggilan menghadiri sidang, antara lain panggilan tidak diterima dan karena keadaan tertentu seperti saksi berada diluar negeri, saksi menderita sakit dan musibah kematian keluarga.<sup>87</sup>

b. Kewajiban untuk bersumpah

Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya, ketentuan ini terbukti dari Pasal 147 HIR, Pasal 1911 KUH Perdata.

Bagi saksi yang tidak mau disumpah, sedangkan sumpah tersebut dijadikan dasar bagi kesaksiannya bahwa apa yang akan dikemukakan itu benar, maka saksi tersebut dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pihak yang memintanya. (Pasal 148 HIR)

Akan tetapi, apabila agama yang dianut saksi melarang mengucapkan sumpah maka sebagai gantinya dapat dengan mengucapkan janji yang fungsinya sama persis dengan sumpah.

---

<sup>86</sup>M. Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 632.

<sup>87</sup>M. Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 633.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo dengan mengutip” Pedoman Keseragaman Tatakerja Pengadilan Negeri di Jawa Barat”, menjelaskan rumusan atau bunyi diucapkan sebagai sumpah atau janji sebagai berikut:

Bagi yang beragama Islam sumpah berbunyi: “demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

Bagi yang beragama Kristen sumpah berbunyi: “saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya” (berdiri dengan mengangkat tangan kanan setinggi telinga serta merentangkan jari telunjuk dan jari tengah).

Bagi saksi ahli bersumpah berbunyi: “saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.

Rumusan janji berbunyi: “saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.<sup>88</sup>

c. Kewajiban untuk memberi keterangan

Penahanan dalam penjara terhadap saksi atas permintaan dan biaya pihak yang meminta yang terkenal dengan sebutan lembaga (gijzelling) belum ada kesatuan pendapat, didalam HIR yang mengatur tentang lembaga sandera ada pada Pasal 209, Pasal tersebut memang belum dicabut, tetapi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1965 tanggal 22 Februari 1964 tentang penghapusan lembaga sandera (gijzeling) dengan alasan lembaga tersebut bertentangan dengan perikemanusiaan dan juga dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 1975 No. 951/K/SP/1974 yang membatalkan keputusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan penyanderaan.

Dalam masalah ini, kewajiban saksi untuk memberikan keterangan apabila ada pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan lebih dahulu kepada hakim. Jadi yang berkepentingan tidak boleh langsung melakukan

---

<sup>88</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 199-120.



tanya jawab kepada saksi melainkan melalui hakimlah tanya jawab itu dilakukan dan hakim juga dapat menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungan dengan perkara.<sup>89</sup>

Sementara dalam hukum Islam, Prinsip utama dalam pembuktian adalah terungkapnya kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.

saksi adalah manusia hidup dan kebanyakan ulama fiqh menyamakan saksi dengan *bayyinah*, tetapi ada juga yang mengatakan *bayyinah* itu segala apa saja yang dapat mengungkap dan menjelaskan kebenaran sesuatu, jadi kesaksian hanya merupakan dari *bayyinah* (bukti).<sup>90</sup>

Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *Syahādah*. Orang yang menjadi saksi disebut dengan *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari timbangan *syāhida-yasyhadu-syahādatan* yang berarti menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian; memberikan kabar yang pasti (akurat dan kredibel); menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Arti yang tidak berbeda bahwa *syahādah* adalah siapa pun melihat kejadiannya suatu peristiwa dan dapat mengabarkan apa yang dilihatnya.<sup>91</sup>

Dengan demikian, jika kewajiban saksi menghadirkan saksi ditinggalkan semuanya akan berakibat menghilangkan hak atau kebenaran, memberi kesaksian

---

<sup>89</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, h. 74.

<sup>90</sup>Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 9; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 152.

<sup>91</sup>Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausu'i li Alfaz al-Qur'an al-Karim wa Qira'atih* (Riyadh: Mua'assasah at-Turas, 2002), h. 976; dikutip dalam Ibnu Elmi As Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian* (Malang: Setara Press, 2015), h. 7.

hukumnya *Fardlu 'āin*, seorang saksi harus memberikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikan jika penggugat memintanya.

Menurut Imam al-Syafi'I mengatakan bahwa suatu benda yang dikuasai pemilik lalu didakwa oleh orang yang memiliki karena suatu keadaan. Maka atas pendakwa harus ada bukti, jika ia dapat membuktikan ia dapat mengambilnya jika tidak maka tergugat harus bersumpah dengan membatalkan/menyanggah gugatan penggugat, tetapi jika ia enggan tidak menyebabkan haknya diberikan kepada penggugat.<sup>92</sup>

Sedangkan Menurut Ibnu Qayyim, kesaksian merupakan bagian dari bayyinah itu segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran terhadap suatu perkara yang dipersengketakan.<sup>93</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau pernyataan yang pasti karena orang tersebut mengetahui kejadian yang sebenarnya. Makna lain bahwa saksi adalah orang yang diminta hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa, orang yang diminta menjadi saksi tersebut adalah orang yang mencukupi syarat dan dipandang memahami dengan baik terhadap apa yang disaksikannya.

#### 1. Dasar pembuktian alat bukti saksi dalam al-Qur'an dan hadist

##### a. Al-Qur'an

Dasar hukum perihal persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2 : 282 yaitu:

---

<sup>92</sup>Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 72.

<sup>93</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 374.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ ۞

Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”.<sup>94</sup>

Ayat tersebut sebenarnya ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an. Apabila dipahami bahwa ayat Allah ini diawali dengan adanya perintah kepada manusia untuk meregistrasikan atau mencatat semua transaksi khususnya utang piutang antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pencatat tersebut penting dilakukan walaupun nilai transaksinya sangat kecil. Selain dilakukan pencatatan Allah juga memerintahkan agar kegiatan transaksi muamalah yang dilakukan mesti disaksikan oleh saksi<sup>95</sup>. jika saksinya adalah dua orang laki-laki, masing-masing bisa bersaksi secara sendiri-sendiri. Tetapi jika saksinya adalah dua perempuan dan seorang laki-laki, kedua perempuan ini harus memberikan kesaksian bersama-sama, sebab yang menjadi alasan adalah perempuan karena kuatnya emosi yang mereka miliki, bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor lalu menyimpang dari jalan yang benar.

Selanjutnya, firman Allah dalam QS Al-Talaq/65: 2 yaitu:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Terjemahnya:

<sup>94</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syamil Quran, 2011), h. 48

<sup>95</sup>Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*, h. 28.

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah”<sup>96</sup>

Maksud dari penggalan ayat diatas yakni bertujuan untuk menunjukkan wajibnya *syahadah* ini (menghadirkan saksi) seperti ucapan diatas dimana diantara kamu orang-orang yang adil.

Dan firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2 : 283 yaitu:

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ

Terjemahnya :

“dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sungguh dia orang yang berdosa hatinya.”<sup>97</sup>

Ayat tersebut mengingatkan kepada para saksi yang diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi agar tidak menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya ketika terjadi suatu permasalahan sementara pihak yang berperkara sangat membutuhkan kesaksiannya. Selain itu, termasuk pula dalam pengertian tidak menyembunyikan kesaksian adalah tidak menyampaikan sama sekali atau jangan mengurangi, melebih-lebihkan kesaksian sehingga di antara yang berperkara ada yang merugikan.<sup>98</sup>

Berdasarkan dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kedudukan saksi baik laki-laki atau pun perempuan dalam suatu akad atau transaksi adalah sangat penting. Pentingnya kedudukan saksi ini dapat dilihat dari pesan al-

<sup>96</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syamil Quran, 2011), h. 945.

<sup>97</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syamil Quran, 2011), h. 49.

<sup>98</sup> M. Quraishi Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesaksian dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 571.

Qur'an yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan sebuah akad atau transaksi untuk dihadapkannya saksi.

b. Hadist

Diantara sekian banyaknya hadis Nabi, tidak sedikit memberikan perhatian terhadap kesaksian. Diantaranya ada yang sangat menganjurkan menjadi saksi kendati tidak diminta, ada pula yang membicarakan atau memfokuskan pada kriteria-kriteria tidak layakannya seseorang sebagai saksi. Selain itu ada juga berupa ancaman kepada saksi dusta bahkan sampai pada kesaksian yang diberikan oleh non muslim.

Beberapa diantara hadis nabi tentang kesaksian, salah satunya yaitu:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يَحْدُثُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا)

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)." (H.R Imam Muslim).<sup>99</sup>

Pada hadis tersebut bahwa sebaik-baik saksi adalah orang yang datang memberikan kesaksian tanpa sebelumnya diminta untuk menjadi saksi. Hadis menceritakan sebaik-baiknya orang yaitu yang datang memberikan kesaksian walaupun tanpa diminta adalah terkait dengan orang-orang yang sebenarnya mengetahui dengan jelas perkara yang disaksikan dan diyakini bahwa seorang saksi tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga apabila ia bersaksi, bukti kebenaran pun dapat ditegakkan.

<sup>99</sup>Muhammad bin Hibban bin ahmad Abu Hatim al-Taimimi al-Busti, *Sahih Ibnu Hibban* (Bairut: Muassas al-Risalah, 1993), h. 470.

## 2. Syarat sah menjadi saksi

Pada umumnya, para saksi yang boleh diajukan dalam sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim;
- b. Sehat akal;
- c. Baligh; dan
- d. Tidak fasik.

As-Sayid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi. Ketujuh hal tersebut adalah:

- a. Islam (dalam hal-hal tertentu ada pengecualian);
- b. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak pendusta);
- c. Baligh;
- d. Berakal (tidak gila atau mabuk);
- e. Hafal dan cermat; dan
- f. Bersih dari tuduhan.

Sebelum memberikan persaksian maka semua saksi harus disumpah oleh hakim. Orang-orang yang ditolak untuk menjadi saksi adalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara
- b. Mahram
- c. Yang berkepentingan atas perkara itu
- d. Sakit jiwa

- e. Fasik (Q.IV : 54), yaitu orang yang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah.
- f. Safih (Q.IV : 5), yaitu yang lemah akal atau dibawah pengampunan.<sup>100</sup>

Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karena itu dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah diurai diatas, maka akan dibahas juga mengenai saksi yang lainnya yang ada dalam persidangan, diantaranya yaitu:

a. Saksi non muslim

Kesaksian non muslim terhadap orang Islam menurut kesepakatan fuqaha tidak diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian orang islam terhadap non muslim ada dua pendapat. Menurut ulama Hanafi boleh sedangkan menurut fuqaha yang lainnya tidak boleh.

Mengenai seseorang dalam keadaan musafir memberikan wasiat yang harus disaksikan dua orang saksi yang adil atau dua orang yang berlainan agama dengan si pemberi wasiat, dalam hal ini juga ada dua pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan orang non muslim menjadi saksi terhadap hal tersebut sebagai mana dalam surah Al-Maidah ayat 106 , sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'I berpendapat tidak diperbolehkan, orang non muslim menjadi saksi terhadap orang Islam baik dalam wasiat keadaan musafir atau dalam keadaan selain itu, karena ayat tersebut telah dinashkan dengan ayat lain.

---

<sup>100</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 136.

Demikianlah, dalam hukum Islam kedudukan kesaksian non muslim dalam peradilan Islam terdapat pemilahan-pemilahan dan berbagai pendapat di dalamnya mengenai persaksiannya.<sup>101</sup>

b. Saksi wanita

Wanita-wanita Arab terdahulu karena sama sekali tidak bergaul dengan laki-laki maka mereka mempunyai pengalaman yang sedikit sekali, oleh karenanya agama Islam hanya membolehkan persaksian wanita dalam masalah-masalah yang hanya dilihat oleh wanita saja. Dan persaksiannya dipandang setengah dari persaksian laki-laki dalam bidang perdata, termasuk didalamnya masalah perekonomian sebagaimana menurut Ibnu Qayyim al-Jauzyyah bahwa Rasulullah saw pernah bertanya sebagai berikut, “Bukankah kesaksian seseorang perempuan itu dinilai separoh kesaksian seorang laki-laki? Mereka menjawab “benar”.”

Keadaan-keadaan yang membolehkan wanita menjadi saksi tanpa disertai laki-laki adalah dalam perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki. Namun harus dipahami bersama bahwa ketentuan hukum yang sekarang tidak membedakan antara status kesaksian laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan untuk penindasan terhadap perempuan.

Oleh karena itu apabila ada diantara perempuan yang menjadi saksi, maka karena jarangya menangani perkara diluar keahliannya atau karena jarangya mereka berperan di bidang kesaksian terhadap berbagai bentuk kesaksian dikhawatirkan ada di antara yang sudah lupa atau sulit dan tidak dapat mengingat kembali sehingga sehingga diperlukan adanya perempuan lain yang diharapkan dapat membantu mengingat kembali sebagai hal yang pernah disaksikan mereka atau yang

---

<sup>101</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, h. 82.



disaksikan untuk diingat kembali pada waktu persidangan, sesuai dengan ketentuan hukum kesaksian laki-laki dan perempuan yang bersumber dari firman Allah QS Al-Baqarah/2: 282.

### 3. Macam-macam Persaksian

Persaksian dalam hal ini tercakup di dalam bermacam-macam bidang kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ali bin Khail membagi macam-macam persaksian atas dasar jumlah saksi/penyaksian, diantaranya yaitu:<sup>102</sup>

- a. Dengan empat orang saksi laki-laki seperti zina dan li'an.
- b. Dengan dua orang saksi laki-laki seperti nikah, rujuk', thalaq, iddah, tamlik, perdagangan dan lain-lainnya.
- c. Dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, persaksian ini diterima di seluruh bidang hukum kecuali golongan Syafi'iyah al Malikiyah dan Hanabilah hanya membolehkan persaksian satu laki-laki dan dua perempuan pada masalah *muamalah maaliyah* (transaksi) sebagaimana yang ditunjukkan oleh Qur'an (QS. al-Baqarah (2): 282) seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, washiyat, gadaian, perjanjian. Ini disebabkan karena wanita itu pada asalnya tidak ada penerimaan syahadah atasnya disebabkan antara lain:
  - 1) Pengaruh perasaannya (emosi) yang lebih besar dari sikap rasionalnya.
  - 2) Lemahnya ingatan dan daya fikir mereka.
  - 3) Sempitnya pergaulan dan pendidikan mereka.

---

<sup>102</sup>Muhammad Nur Abduh, *Persaksian Perempuan dalam Al-Quran* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 82-83.

**B. *Sisi Komparatif Keterangan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam***

Keterangan saksi menurut hukum nasional yang diatur berdasarkan undang-undang acara peradilan dan hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an. Mempunyai kesamaan dan perbedaan mengenai keterangan seorang saksi walaupun keduanya tidak begitu memiliki banyak perbedaan dan akan diuraikan sebagai berikut:

**1. Persamaan**

Dari sudut persamaan, hukum Islam menerima pembuktian yang tidak hanya melalui saksi tetapi dapat pula melalui alat bukti lainnya, khususnya terkait dengan dokumen berupa pencatatan. Bahkan dilihat dari urutan pembuktian sebagaimana pada firman Allah yang telah mengatur tentang saksi, pembuktian melalui dokumen tulisan adalah urutan pertama dan kemudian ditambah pembuktian melalui kesaksian pada urutan kedua.

Dalam hukum nasional hal ini sama seperti yang diberlakukan di dalam kitab undang-undang hukum acara perdata yang menyatakan saksi diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian masing-masing pihak yang berperkara.

Tujuan dari membuktikan kebenaran adalah menganggap suatu hal yang sangat penting, terkait dengan beban pembuktian sama-sama didahulukan pada penggugat yang mengaku memiliki hak dan untuk pembuktian yang seimbang artinya tergugat juga harus membuktikan bantahannya.

Sehingga terciptalah suatu keadilan yang benar-benar sesuai dengan apa yang disaksikannya oleh para saksi.

## 2. Perbedaan

Perbedaan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam beracara terletak pada sumbernya yakni

Menurut hukum nasional dalam pembuktiannya mengenai saksi dimuat dalam pasal-pasal yang tertuang dalam undang-undang, para pemikir hukum dan sebagai salah satu alat bukti.

Sedangkan dalam hukum acara Islam dasar pembuktiannya bersumber dari Al Qur'an, As-Sunnah dan Al ijtihad. Saksi dalam Al Qur'an dipahami sebagai rukun suatu perbuatan hukum.

Adanya perbedaan tersebut intinya adalah Al Qur'an sebagai rukun, kehadiran saksi sebagai rukun pada saat akad berlangsung artinya wajib dan ketidakhadirannya mengakibatkan tidak sahnya akad. Adapun saksi dalam hukum acara nasional sebagai alat bukti artinya untuk membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum.

## 3. Kelebihan

Dalam hal urutan saksi yang berada dalam urutan kedua, sebenarnya hukum Islam yang memiliki dasar Al Qur'an dan hadist terlebih dahulu ada sebelum adanya ketentuan dari hukum nasional yang sebenarnya mengikuti hukum pembuktian dalam hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hukum pembuktian dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat yakni dalam QS. Al-Baqarah 2/282.

Sementara dalam hukum nasional ditentukan bahwa agar keterangan yang diberikan saksi dapat dipercaya dan menyakinkan hakim maka saksi tersebut berjumlah dua orang dan tidak pula menentukan atau membedakan syarat saksi berdasarkan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan suara yang sama untuk menyampaikan keterangan yang dilihatnya sendiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam hukum nasional telah dimuat dalam pasal-pasal berdasarkan undang-undang dasar, sahnyanya keterangan saksi yang disampaikan dilihat dari kualitas diri saksi dan penyebab saksi mengetahui kesaksiannya sehingga saksi berkewajiban untuk disumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan untuk menguatkan keterangannya. Kekuatan pembuktian yang bersifat bebas sehingga hakim bebas untuk menilai keterangan yang disampaikan para saksi untuk mengungkap pokok-pokok permasalahan yang sebenarnya dengan pertimbangan yang cukup. Sedangkan dalam hukum Islam saksi dikenal dengan sebutan (*syahadah*) yakni orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami dan disaksikan tentang suatu peristiwa. Hukum mendatangkan saksi dengan memenuhi segala syarat merupakan keharusan. memberi kesaksian hukumnya *Fardhu ain* seorang saksi harus memberikan kesaksiannya sebenar-benarnya dan tidak boleh menyembunyikannya dari apa yang dia ketahui
2. Komparasi yang telah dilakukan terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti menurut hukum nasional dan hukum Islam, jika dilihat dari

persamaannya sama-sama bertujuan agar keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dan pembuktian saksi berada diurutan kedua. jika dilihat dari sisi perbedaannya hukum nasional bersumber dari aturan perundang-undangan dan sebagai alat bukti. Sedangkan dalam hukum Islam bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah sehingga saksi dikatakan sebagai rukun yakni menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum.

### ***B. Implikasi***

Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam seharusnya memerhatikan keterangan saksi pada saat menyampaikan keterangannya sebab psikologis dari seorang saksi sangat berpengaruh terhadap keterangan yang disampaikan.
2. Walau terdapat perbedaan yang tidak cukup banyak dalam hukum nasional maupun hukum Islam kiranya dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Pentingnya keterangan saksi inilah yang membuat Allah pun melarang kepada orang yang menyimpan suatu informasi, sementara ia mengetahui informasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad Nur. *Persaksian Perempuan dalam Al-Quran*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Ahmad, Amrullah dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.
- A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 9; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Arto, A. Mukti. *Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2007.
- Farida, Anna. *Tafsir Nurul Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Glase, Girjil. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. dikutip dalam Ibnu Elmi As Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*. Malang: Setara Press, 2015.
- Hamzah, Jur Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*. Bandung: Syamil Quran, 2011.

- Lubis, Sulaikin dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mahmasani, Sobhi Filsafatu at-tasyri' fi al-Islam. *Terjemah Ahmad Sudjono Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: PT. Alma Arif, 1976.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Marwan dan Jimmy.P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Jembatan, 1999.
- Muhammad bin Hibban bin ahmad Abu Hatim al-Taimimi al-Busti. *Sahih Ibnu Hibban*. Bairut: Muassas al-Risalah, 1993.
- Ny.Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pitlo. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Cet. 1; Jakarta: Intermasa, 1978.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Cet. III; Bandung: Nusa Media, 2013.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2008.
- Republik Indonesia. *Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945*. Buku ke IV. bab III.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. bab IV. Tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*. bab XVI. Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Surabaya: Akbar Media, 2013.

- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Cet. 2; Bandung: P.T. Alumni, 2004.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Simorangking dan Prasetyo. *Kamus Hukum*. Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Shiddieqi, T.A. Hasbi ash. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: 1964.
- Shihab, M. Quraishi. *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesaksian dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *al-Mu'jam al-Mausu'i li Alfaz al-Qur'an al-Karim wa Qira'atih*. Riyadh: Mua'assasah at-Turas, 2002. dikutip dalam Ibnu Elmi As Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*. Malang: Setara Press, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 1996.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MARWA R, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 7 Juni 1996 dari pasangan Ruddin dan Hamsinah. Merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Penulis pertama kali melangkahkan kaki ke dunia pendidikan pada tahun 2001 di SD Inpres Maccini 1/1 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke tingkat pertama di SMP Negeri 4 Makassar pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat atas di SMA Negeri 16 Makassar pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian setelah tamat penulis lulus jalur Undangan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 dengan mengambil jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R